

INSTITUT PERTANIAN BOGOR
LEMBAGA PENELITIAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

PUSAT STUDI PEMBANGUNAN
PERTANIAN DAN PEDESAAN

“Mencerdaskan, Menswadayakan, Mensejahterakan, dan Melestarikan”

RENCANA STRATEGIS
2013-2017

MEMBANGUN PERTANIAN KERAKYATAN DAN
PEDESAAN BERKELANJUTAN

No	Kegiatan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat (PKPBM)	Melahirkan model baru fasilitasi pengembangan kawasan perdesaan dalam bingkai UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa	Evaluasi terhadap model fasilitasi pengembangan kawasan perdesaan dalam bingkai UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa	Terbentuknya kawasan-kawasan perdesaan (dalam bingkai UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa) yang dijadikan best practice	PKPBM menjadi kebijakan nasional pemerintah dalam upaya mendorong pembangunan partisipatif yang mensejahterakan masyarakat perdesaan	Terbentuknya kawasan perdesaan di semua Kabupaten di Indonesia.
2	Sekolah Peternakan Rakyat	Mengorganisasi dan melakukan fasilitasi untuk memperkuat kelembagaan peternak dalam satuan kawasan	Lahirnya kelembagaan peternak yang kuat yang mampu menciptakan kader-kader peternak rakyat	Terwujudnya sebuah succes history tentang model pendidikan komunitas peternak dalam sebuah kawasan serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan SPR	Sekolah Peternakan Rakyat direplikasi oleh Pemerintah Pusat dan Daerah yang dijadikan model pendidikan komunitas peternakan	SPR menjadi gerakan kolektif pemerintah dan rakyat dalam membangun perekonomian daerah berbasis peternakan di seluruh kabupaten di Indonesia
3	Pendampingan Pengembangan Hutan Rakyat dan Perkebunan Rakyat	Melakukan fasilitasi, edukasi dan mendorong pengembangan hutan dan perkebunan berbasis masyarakat	Terbentuknya kelembagaan pengembangan hutan dan perkebunan rakyat dalam satuan kawasan perdesaan yang berbasis masyarakat	Terwujudnya model pengembangan hutan dan perkebunan berbasis masyarakat mandiri yang mensejahterakan yang dapat menjadi contoh sukses di sebuah wilayah, sehingga bisa direplikasi	Pengembangan Hutan Rakyat dan Perkebunan Rakyat direplikasi oleh Pemerintah Pusat dan Daerah yang dijadikan model pengembangan bisnis berorientasi penguatan ekonomi pedesaan	Pengembangan Hutan Rakyat dan Perkebunan Rakyat menjadi basis gerakan dalam pengelolaan hutan dan perkebunan di Indonesia, dimana rakyat menjadi pelaku utamanya

4	Pembangunan Pertanian Kerakyatan	Gagasan perwujudan pengembangan agroekosos (pertanian kerakyatan)	Fasilitasi model pertanian kerakyatan terhadap masyarakat pedesaan	Pembentukan kelembagaan pertanian kerakyatan	Membuat dokumentasi <i>sukses history</i> pertanian kerakyatan	Sebagai basis pemberdayaan bagi pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan petani di Indonesia
5	Sekolah Perikanan Rakyat (SPR)/ Minapolitan Budidaya Berbasis Masyarakat	Diskursus metodologi pengembangan Minapolitan Budidaya Berbasis Masyarakat	Pengorganisasian dan penguatan kelembagaan nelayan/peternak ikan. Juga dapat menjalin jejaring dengan institusi-institusi yang memiliki tradisi pengembangan perikanan	Terbentuknya kelembagaan nelayan/peternak ikan yang mampu menciptakan kader-kader yang dapat dijadikan sebagai lokomotif pembangunan perikanan	SLPR mampu menghasilkan sebuah model pemberdayaan nelayan/peternak ikan yang menjadi <i>sukses history</i> .	Adanya model pendidikan komunitas nelayan/peternak ikan ala SLPR dapat direplikasi oleh pemerintah maupun pemerintah daerah.
6	Usaha Rakyat	Diskusi intens dengan Dirjen PMD Kemendagri terkait usaha rakyat dan keuangan inklusif	Pengorganisasian dan penguatan kelembagaan usaha rakyat.	Terbentuk kelembagaan usaha rakyat yang mampu menciptakan membangkitkan ekonomi pedesaan.	Usaha rakyat mampu sebagai kekuatan ekonomi alternatif di pedesaan dan menjadi <i>sukses history</i> .	Adanya model ekonomi solidaritas yang bertumpu pada usaha rakyat dapat direplikasi oleh pemerintah maupun pemerintah daerah.

7	Pengembangan Keuangan Inklusif Bagi Pertanian-Pedesaan	Diskusi intens terkait gagasan membangun keuangan inklusif untuk pembangunan pertanian dan pedesaan	Membangun model keuangan inklusif yang mampu menopang pembangunan pertanian-pedesaan	Implementasi model keuangan inklusif bagi pembangunan pertanian-pedesaan sesuai dengan konteks sosio-ekologisnya	Keuangan inklusif dapat dijadikan sebagai pijakan pembiayaan pertanian-pedesaan dan model keuangan inklusif ini dapat direplikasi oleh pemerintah maupun pemerintah daerah
8	Reforma Agraria dan Penguatan Institusi dan Komunitas Desa Adat	Diskusi intens terkait reforma agraria dan pola penguatan institusi dan komunitas desa adat	Identifikasi potensi desa adat terkait dengan sistem nilai pengelolaan sumberdaya alam, sosial-politik, dan aktor-aktor strategis yang dapat digerakkan sebagai lokomotif penguatan desa adat.	Penguatan kapasitas (institusi maupun komunitas) desa adat	Pendampingan desa adat sekaligus mendokumentasikannya ke dalam bentuk visualisasi sebagai case study penguatan dan pengembangan desa adat di Indonesia.
9	Demokrasi Lokal dan Politik Pertanian	Diskursus demokrasi lokal dan politik pertanian	Pemetaan model demokrasi lokal dan politik pertanian yang efektif sesuai dengan konteks kemajemukan rakyat Indonesia.	Penguatan kapasitas aktor-aktor strategis sebagai pilar utama dalam perwujudan demokrasi lokal dan politik pertanian.	Pendampingan dan dokumentasi dalam bentuk visualisasi sebagai case study penguatan dan pengembangan demokrasi lokal dan politik pertanian di Indonesia.

